



# AKUTANSI KEUANGAN DAERAH

Penulis: Winarti, S.E.,M.Ak

# **AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

**Penulis**  
**Winarti, S.E., M.Ak**

**Penerbit**



# AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Penulis

Copyright © 2023 by Lajagoe Pustaka

Diterbitkan oleh:

**Penerbit**

Lajagoe Pustaka

Jl. Harapan Bangsa Perumahan BTN Batulappa Blok D1/1 Sidenreng Rappang

Tlp. 0421-3594821

Email [info@lajagoe.com](mailto:info@lajagoe.com)

[www.lajagoe.com](http://www.lajagoe.com)

Penyunting:

Tata letak: Nurhadi, S.E., M.Si

Desain Cover: Nurhadi, S.E., M.Si

Terbit: 01 Oktober, 2023

ISBN: 978-623-09-5776-5

Anggota IKAPI : 050/SSL/2023

---

---

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling

# KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan dasar, membangun infrastruktur, dan menjalankan berbagai program yang membentuk kualitas hidup warganya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tugas mereka dengan efisien, efektif, dan transparan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan adalah alat yang kuat yang membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial mereka dengan bijak dan memberikan laporan yang akurat kepada pemangku kepentingan. Kami akan menjelajahi berbagai aspek dari akuntansi keuangan pemerintah daerah, termasuk konsep dasar, prinsip-prinsip akuntansi, serta praktik dan prosedur yang relevan.

Buku ini ditujukan tidak hanya kepada para praktisi akuntansi pemerintah daerah, tetapi juga kepada mahasiswa, pemimpin pemerintah daerah, legislator, auditor, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami bagaimana keuangan pemerintah daerah dikelola dan dilaporkan. Dalam buku ini, kami akan membahas isu-isu yang relevan, termasuk perubahan dalam standar akuntansi, pelaporan kinerja, pengelolaan dana, dan banyak lagi.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu meningkatkan pemahaman tentang akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Selamat membaca, dan kami berharap buku ini menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Salam

Penulis

# RINGKASAN

Buku ajar "Akuntansi Keuangan Daerah" adalah sumber informasi komprehensif yang dirancang untuk mahasiswa, profesional keuangan, dan mereka yang tertarik untuk memahami akuntansi keuangan pemerintah daerah. Buku ini menguraikan berbagai konsep, prinsip, dan praktik yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami dasar-dasar akuntansi keuangan daerah, termasuk anggaran, pendapatan, dan belanja. Konsep-konsep seperti pembiayaan, pengelolaan dana, dan penilaian aset tetap juga dijelaskan secara rinci. Penekanan diberikan pada pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta bagaimana menerapkannya dalam praktik akuntansi sehari-hari. Selain itu, Buku ini disusun dengan jelas, dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, studi kasus, dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca memahami dan menerapkan konsep-konsep akuntansi dalam konteks pemerintah daerah.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Istilah-Istilah Akuntansi Keuangan Daerah ....	2
C. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah .....	6
<b>Contoh Soal .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>10</b>
A. Pendahuluan.....	13
B. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan .....	11
C. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan ...	14
D. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah .	18
E. Pengakuan Dan Pelaporan Unsur Laporan Keuangan .....	22
F. Standar Akuntansi Pemerintahan .....	22
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>25</b>

<b>BAB III LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>26</b>
A. Pendahuluan.....	26
B. Pengertian Laporan Keuangan.....	27
C. Entitas Laporan Keuangan.....	28
D. Tujuan Laporan Keuangan.....	29
E. Jenis-Jenis Laporan Keuangan.....	31
<b>CONTOH SOAL</b> .....	<b>35</b>
<b>BAB IV KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>36</b>
A. Pendahuluan.....	36
B. Keterkaitan Neraca Dan Laporan Keuangan ...	37
C. Laporan Laba Rugi.....	38
D. Perubahan Modal .....	41
E. Laporan Arus Kas.....	45
F. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	50
<b>CONTOH SOAL</b> .....	<b>52</b>
<b>BAB V STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN</b> .....	<b>54</b>
A. Pendahuluan.....	54
B. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Sebagai Regulasi Terkini Di Indonesia .....	56
C. Proses Penyusunan SAP .....	63
D. Penerapan SAB Berbasis Akrua.....	67
E. SAP Berbasis Kas Menuju Akrua.....	68
F. PSAP Dalam Dua Basis SAP .....	70
G. Perubahan PSAP.....	72
H. Tantangan Yang Dihadapi Akuntansi Pemerintahan.....	73



<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>76</b>
<b>BAB VI AKUNTANSI PENDAPATAN.....</b>	<b>79</b>
A. Pendahuluan.....	79
B. Akuntansi Pendapatan .....	79
C. Klasifikasi Pendapatan.....	80
D. Pengakuan Pendapatan.....	82
E. Pengukuran Pendapatan.....	84
F. Pencatatan Akuntansi Pendapatan .....	86
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB VII AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN .....</b>	<b>93</b>
A. Pendahuluan.....	93
B. Definisi Belanja Dan Beban .....	95
C. Klasifikasi Belanja Dan Beban .....	96
D. Pengakuan Belanja Dan Beban .....	100
E. Pengukuran Belanja Dan Beban .....	106
F. Contoh Jurnal Standar Beban Dan Belanja ....	115
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>136</b>
<b>BAB VIII AKUNTANSI PEMBIAYAAN.....</b>	<b>138</b>
A. Pendahuluan.....	138
B. Definisi Akuntansi Pembiayaan.....	139
C. Klasifikasi Pembiayaan .....	139
D. Pengakuan Transaksi Pembiayaan .....	140
E. Pengukuran Pembiayaan .....	140
F. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan .....	141
G. Contoh Kasus .....	142

<b>BAB IX AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN AKUNTANSI INVESTASI .....</b>	<b>147</b>
A. Pendahuluan.....	147
B. Deskripsi Persediaan .....	148
C. Tujuan Akuntansi Persediaan.....	149
D. Metode Pencatatan Persediaan .....	152
E. Definisi Investasi.....	153
F. Bentuk Investasi .....	154
G. Klasifikasi Akuntansi Investasi .....	156
H. Prosedur Akuntansi Investasi .....	160
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>171</b>
<b>BAB X AKUNTANSI ASET TETAP .....</b>	<b>173</b>
A. Pendahuluan.....	173
B. Pengertian Aktiva Tetap.....	174
C. Harga Perolehan .....	177
D. Perbedaan Pengeluaran Modal Dan Pengeluaran Pendapatan.....	179
E. Penyusutan .....	181
F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Penyusutan .....	182
G. Metode Perhitungan Penyusutan .....	183
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>190</b>
<b>BAB XI AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan .....</b>	<b>192</b>
A. Pendahuluan.....	192
B. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	193

C. Kontrak Konstruksi .....	195
D. Penyatuan Dan Segmentasi Kontrak Konstruksi	196
E. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	198
F. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan ...	200
G. Penghentian Konstruksi Dalam pengerjaan ...	202
H. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan ....	203
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>211</b>
<b>BAB XII AKUNTANSI KEWAJIBAN .....</b>	<b>213</b>
A. Pendahuluan.....	213
B. Definisi Akuntansi Kewajiban.....	214
C. Klasifikasi Kewajiban .....	217
D. Pengakuan Dan Pengukuran Kewajiban .....	220
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>225</b>
<b>BAB XIII AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD .....</b>	<b>227</b>
A. Pendahuluan.....	227
B. Pengertian Aset Tak Berwujud .....	228
C. Karakteristik Aset Tidak Berwujud .....	230
D. Klasifikasi dan Prinsip Akuntansi Dasar Aset Tak Berwujud.....	231
E. Pencatatan Dan Penilaian Aset Tidak Berwujud Tersebut .....	234
F. Mencatat Biaya Aset Tak Berwujud Yang Dibuat Secara Internal .....	235
G. Jenis-Jenis Aset Tidak Berwujud.....	236
H. Aset Tak Berwujud Yang Dapat Dipertukarkan	240
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>247</b>

<b>BAB XIV SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH .</b>	<b>249</b>
A. Pendahuluan.....	249
B. Gambaran Umum Siklus Akuntansi.....	250
C. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah .....	252
D. Analisis Transaksi .....	253
E. Jurnal Transaksi.....	256
F. Posting Ke Buku Besar .....	263
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>266</b>
<b>BAB XII PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>268</b>
A. Pendahuluan.....	268
B. Definisi Laporan Keuangan Daerah .....	269
C. Bentuk Dan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Daerah .....	270
<b>CONTOH SOAL .....</b>	<b>302</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>GLOSSARIUM</b>	
<b>TENTANG PENULIS</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhytama, S. 2017. “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sasp), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*” *Jurnal Akuntansi* 5(2).
- Aditya, O. R. dan W. Surjono. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* Universitas Sangga Buana. Bandung.
- Afiyah dan N. Nunuy. 2009. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.* Kencana. Jakarta.
- Afiyah dan N. Nunuy 2010. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah .* Kencana. Jakarta.
- Andriani, S., S. Rahayu dan H. Junaidi. 2016. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Merangin Tahun 2016).* Universitas Jambi.
- Ariesta, F. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat).* Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang.

- Baumann, C., M. Bauman dan R. Halsey. 2001. *Do Firm Use Deferred Tax Asset Valuation Allowance to Manage Earnings? The Journal of the American Taxation Association 23 (Supplement)*. COSO. 2013. Intern Control-Integrated Framework. [www.coso.org](http://www.coso.org)
- Darmawan, H. 2012. *How To Make Comic. Plotpoint Publishing* (PT. BENTANG PUSTAKA). Jakarta.
- Darmawan, A dan Darwanis. 2018. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi dan Komplikasi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh*. Program Studi Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 3, No. 1, (2018) : 9-19.
- Fahmi, I. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Fajar, A. 2010. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung*. Skripsi. Jurnal Akuntansi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting*. Norwalk.
- Halim, A. dan S. kusufi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- . 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba empat. Jakarta.
- Hamzah, A., Yabbar, dan Rahman. 2009. *Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual*. Penerbit Pustaka. [Shvoong.com/writing-and-speaking /presenting/2131804](http://Shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2131804). Surabaya.

- . Hamzah 2015. *Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua*. Penerbit Pustaka. Shvoong.com / writing-and speaking / presenting / 2131804. Surabaya.
- Hanaffi, R. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Pati)*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hannafi. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati)*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hardyansyah. 2016. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada OPD Kabupaten Polewali Mandar*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban 1:41-65.
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Isnanta, R. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*". Fakultas Ekonomi Ull: Yogyakarta.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency cost and Ownership Stucture*. Journal of Financial Economis, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, PP. 305-360.
- Jogiyanto. 2008. *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta.

- Kadir, A. 2005. *Dasar Pemrograman Web dengan ASP*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kadir, A. dan T. C. Triwahyuni. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Kalumata, M. C. T., H. Ventje dan J. D. L. Warongan. 2016. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Akuntansi. Sulawesi Utara.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Unit penerbit & percetakan. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, edisi ketiga. YKPN. Unit penerbit & percetakan. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Salemba Empat.  
Jakarta.
- Nadir, R. dan Hasyim. 2017. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru)*. E-Jurnal AKUNTABEL Volume 14, No 1 2017. ISSN: 2302- 8556. Universitas Udayana.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurillah. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan*



*Daerah (SADK), (Studi Empiris Pada OPD Kota Depok).* Universitas Diponegoro Semarang.

Nuryanto, M dan N. N. Afiah. 2013. *The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Intern Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province- Indonesia.* World Review of Business Research Vol. 3. No. 4. November 2013 Issue. Pp. 157 - 171.

Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2007 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah. No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah. No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah.Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.

Permendagri No.59. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Permendagri No.13. 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 4. 2008. tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pravasanti, Y. A. dan S. Ningsih. 2019. *Pengaruh Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Terhadap Kualitasn Laporan Keuangan*

*Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo)*. STIEE AAS Surakarta. Volume 2

Setiawan, I. W. N. dan Gayatri 2017. *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 21, 671-700.

Sihite, R. N. dan Holiawati. 2017. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. 9 (2), 2017, 81-92. Universitas Pamulang Tangerang Selatan.

Subhan, M. 2012. *Analisa Perancangan Sistem*. Lentera Ilmu Cendikia. Jakarta

Sukrisno, A. 2004. *Auditing Pemeriksaan Akuntan. Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Jakarta.

Sutabri, T. 2014. *Analisis Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Warren. Fess dan Reeve. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Weygandt, J. J., Kieso, D. E. dan P. D. Kimmel. 2007. *Accounting Principles*

*Pengantar Akuntansi*, Edisi Ketujuh, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wilkinson, W. J., J. C. Michael, R. Vasant, dan W.O.W. Berdard. 2000. *Accounting*

*Information Systems : Essential Concepts and Applications* (4th Ed.).

Washington : John Wiley And Sons, Inc.

www.bpk.go.id - IHPS II Tahun 2019.

Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya ,Amusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Universitas Muria Kudus. Kudus

## **GLOSARIUM**

1. Akuntansi Keuangan Daerah: Sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya finansial dan melaporkan kinerjanya.
2. Anggaran: Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan pendapatan yang diharapkan dan pengeluaran yang diizinkan untuk berbagai program dan kegiatan.
3. Pendapatan: Uang atau nilai yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak, hibah, dan penerimaan lainnya.
4. Belanja: Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program, layanan, dan proyek-proyek tertentu.
5. Aset Tetap: Properti dan peralatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan dalam operasi rutin atau proyek-proyek jangka panjang.
6. Kewajiban: Utang atau kewajiban finansial yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti utang obligasi atau utang lainnya.

7. **Pembiayaan:** Sumber dana yang digunakan untuk mendukung belanja pemerintah daerah, termasuk pinjaman, hibah, dan pendapatan yang belum dihabiskan.
8. **Amortisasi:** Pengurangan nilai aset tetap atau kewajiban jangka panjang secara seiring waktu.
9. **Depresiasi:** Pengurangan nilai aset tetap seperti gedung dan kendaraan dalam pencatatan akuntansi seiring waktu.
10. **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:** Dokumen yang memuat informasi tentang keuangan pemerintah daerah, termasuk Laporan Pendapatan dan Belanja, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
11. **Catatan Atas Laporan Keuangan:** Bagian dari laporan keuangan yang menjelaskan atau memberikan detail tambahan tentang item tertentu dalam laporan.
12. **Surplus:** Kelebihan pendapatan daripada belanja dalam anggaran pemerintah daerah.
13. **Defisit:** Kekurangan pendapatan daripada belanja dalam anggaran pemerintah daerah.
14. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):** Organisasi independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai laporan keuangan pemerintah daerah serta menjalankan fungsi audit.

15. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Panduan dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengatur praktik akuntansi pemerintah daerah.
16. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAKIP): Panduan dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengatur praktik akuntansi pemerintah daerah.
17. Dana Cadangan: Dana yang disimpan oleh pemerintah daerah sebagai cadangan untuk menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendesak.
18. Pengawasan: Proses pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah oleh pihak-pihak terkait, termasuk warga, legislator, dan pihak eksternal.
19. Akuntabilitas: Prinsip akuntansi yang mengharuskan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan mereka.
20. Transparansi: Keterbukaan dan keterbacaan informasi keuangan pemerintah daerah bagi pemangku kepentingan
21. Biaya Tetap: Biaya yang tidak berubah seiring dengan volume aktivitas atau pengeluaran pemerintah daerah, seperti biaya sewa untuk gedung kantor.
22. Biaya Variabel: Biaya yang berubah seiring dengan volume aktivitas atau pengeluaran pemerintah daerah, seperti biaya bahan dan tenaga kerja yang terkait dengan proyek tertentu.

23. Laporan Operasional Pemerintah Daerah: Laporan yang menggambarkan kinerja operasional pemerintah daerah, termasuk pendapatan dan belanja untuk program dan layanan tertentu
24. Penerimaan Kas: Uang yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk tunai atau setara kas.
25. Pendapatan Tak Terbatas: Pendapatan yang tidak memiliki batasan waktu penggunaannya, seperti pendapatan dari hibah yang dapat digunakan pada berbagai proyek.
26. Pendapatan Terbatas: Pendapatan yang harus digunakan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.
27. Pajak: Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari warga atau perusahaan sebagai pajak atas pendapatan atau properti mereka.
28. Ekuitas: Bagian dari aset pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemangku kepentingan, yang dapat mencakup ekuitas bersih dan dana cadangan.
29. Pembiayaan Internal: Sumber dana yang berasal dari pendapatan yang belum dihabiskan atau surplus anggaran pemerintah daerah.
30. Pembiayaan Eksternal: Sumber dana yang berasal dari pinjaman, utang obligasi, atau hibah dari pihak luar.

31. **Pengalihan Dana:** Pemindahan dana antarakun atau program dalam pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan atau proyek tertentu.
32. **Evaluasi Kinerja:** Proses untuk mengukur dan menilai efektivitas program dan layanan yang didanai oleh pemerintah daerah.
33. **Kebijakan Akuntansi:** Panduan dan aturan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka.
34. **Perencanaan Keuangan:** Proses penyusunan rencana keuangan jangka panjang pemerintah daerah untuk mencapai tujuan keuangan mereka.
35. **Pelaporan Kinerja:** Proses menyusun dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan kinerja pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan.
36. **Dana Pemerintah Daerah:** Entitas yang berfungsi sebagai entitas akuntansi terpisah untuk mengelola keuangan dan operasi pemerintah daerah dengan lebih terfokus.
37. **Perubahan Ekuitas:** Laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemerintah daerah dari periode ke periode, mencakup investasi pemilik, pendapatan bersih, dan lain-lain.



38. Gedung dan Peralatan: Jenis aset tetap yang mencakup gedung-gedung, peralatan kantor, dan fasilitas lain yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah daerah.
39. Biaya Overhead: Biaya-biaya operasional yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ke suatu proyek atau program tertentu dan sering kali dikelompokkan sebagai biaya tidak langsung.
40. Akuntansi Dana: Sistem akuntansi yang memisahkan dana pemerintah daerah menjadi berbagai jenis dana, seperti dana umum, dana khusus, dan dana lainnya, untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan.
41. Dana Khusus: Dana yang diwujudkan untuk tujuan tertentu dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan tersebut, seperti dana pendidikan atau dana infrastruktur.
42. Laporan Tahunan: Dokumen yang menyajikan ringkasan pencapaian dan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
43. Audit Keuangan: Proses pemeriksaan independen atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh auditor eksternal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan.
44. Dana Dekonstruksi: Dana yang digunakan untuk menutupi biaya pemutusan hubungan kerja dan manfaat lainnya bagi karyawan yang dipecah atau pensiun.

45. Pembatalan Anggaran: Tindakan pemerintah daerah untuk membatalkan atau mengurangi dana yang telah dianggarkan untuk suatu program atau proyek tertentu.
46. Surat Utang: Instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk utang, sering kali dalam bentuk obligasi atau surat perintah pembayaran.

## TENTANG PENULIS



Winarti, S.E.,M.Ak lahir di Sidoarjo, 18 Maret 1983. Anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Wakiran (Alm) dan Ibu Rupiayati. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makasar. Menyelesaikan S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar (UMI) pada Tahun 2022. Pekerjaan Dosen Tetap STIE Indonesia Makasar. Email: nartistiki@gmail.com

## TENTANG EDITOR



Nurhadi, S.E.,M.Si lahir di Sinjai, 01 Januari 1977. Jenjang Pendidikan S1 Manajemen di STIE Indonesia Makassar. Pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin Makassar (2014).

Saat ini melanjutkan studi S3 Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan menjadi keluarga BPI (Beasiswa Pendidikan Indonesia). Pekerjaan sebagai Dosen Tetap Yayasan di STIE Indonesia Makassar (Staf Kemahasiswaan) bergabung di Forum Manajemen Indonesia (FMI) Korwil Sulawesi Selatan (2023-2025), sebagai Ketua Yayasan Perguruan Amannagappa (YPAGI) Makassar, dan bergabung sebagai Staf Profesional DPRD Sulawesi Selatan (2022-2023). Email:

[adhi.nurhadi1@gmail.com](mailto:adhi.nurhadi1@gmail.com)

# AKUTANSI KEUANGAN DAERAH



Winarti, S.E., M.Ak lahir di Sidoarjo, 18 Maret 1983. Anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Wakiran (Alm) dan Ibu Rupiyyati. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Menyelesaikan S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar (UMI) pada Tahun 2022. Pekerjaan Dosen Tetap STIE Indonesia Makasar STIKI. Email: nartistiki@gmail.com

Buku ajar "Akuntansi Keuangan Daerah" adalah sumber informasi komprehensif yang dirancang untuk mahasiswa, profesional keuangan, dan mereka yang tertarik untuk memahami akuntansi keuangan pemerintah daerah. Buku ini menguraikan berbagai konsep, prinsip, dan praktik yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami dasar-dasar akuntansi keuangan daerah, termasuk anggaran, pendapatan, dan belanja. Konsep-konsep seperti pembiayaan, pengelolaan dana, dan penilaian aset tetap juga dijelaskan secara rinci. Penekanan diberikan pada pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta bagaimana menerapkannya dalam praktik akuntansi sehari-hari. Selain itu, Buku ini disusun dengan jelas, dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, studi kasus, dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca memahami dan menerapkan konsep-konsep akuntansi dalam konteks pemerintah



Penerbit  
Lajagoe Pustaka  
Jl. Harapan Bangsa Blok D1/1  
Sidenreng Rappang  
Tlp : 04213594821  
Email ; info@lajagoe.com

